

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet 2 Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ed. 1-cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet 7 Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, ed revisi cet 16 (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007 (Jakarta: Balai Pustaka)
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, Hans, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, BEE Media Indonesia.
- Kelsen, Hans, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisal Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 4 (Yogyakarta : Liberty)
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet .4 Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi, 2020, *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, ed 1, cet 3, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, ed 1-cet 7,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group)
- Raharjo, Handri, 2012, *Hukum Perusahaan*. Cet. 1. Yogyakarta: MedPress Digital.

Satrio, J, 2020, Perseroan Terbatas (yang tertutup) Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Bagian Pertama, cet 1, PT RajaGrafindo Persada

Soekanto, Soerjono, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Internet

Tanpa penulis, Tanpa tahun, KBBI, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 11 September 2021

Qur`ani, Hamalatul, 2020, Bertahun urus likuidasi lamanya penutupan NPWP harus dievaluasi, www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8438b84c381/bertahun-urus-likuidasi-lamanya-penutupan-npwp-harus-dievaluasi, diakses 27 September 2020

Tanpa penulis, Tanpa tahun, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran, diakses 12 Februari 2021

Ahlan Sjarif, Fitriani, 2022, Cara memaknai keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-memaknai-keberlakuan-uu-cipta-kerja-pasca-putusan-mk-cl1703>, diakses 11 April 2022

Pramono, Nindyo 2012, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>, Perbandingan Perseroan Terbatas di beberapa Negara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembina Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses 11 April 2022

Tanpa penulis, Tanpa tahun, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/penghapusan-nomor-pokok-wajib-pajak>, diakses 11 April 2022

Tanpa penulis, Tanpa Tahun, https://oss.go.id/informasi/mekanisme-pengawasan?tab=3&sub_tab=2, diakses 12 januari 2022

Saragih, Samdysara, sertifikasi likuidator, MK tolak Uji Materi UU Perseroan Terbatas, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190214/15/888876/sertifikasi->

likuidator-mk-tolak-uji-materi-uu-perseroan-terbatas, diakses 19
Desember 2022

Jurnal

Sufriadi 2014, “Tanggungjawab Jabatan dan Tanggungjawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.1, Juni 2014: 57-72, hlm 60

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.